

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	RAKYAT MERDEKA	13	18-08-2002

Kalau Subsidi BBM Dicabut

Hidup Rakyat Makin Tersiksa

Rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi dan memberlakukan harga BBM sesuai harga pasar pada 2003, dipastikan akan semakin menyulitkan rakyat.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Suksmaningsih menyatakan, kebijakan pemerintah itu dipastikan akan memicu naiknya ongkos transportasi, yang pada akhirnya akan memicu naiknya harga barang dan jasa (inflasi) dan mendorong semakin banyaknya pengangguran.

Seperti diketahui, dalam keterangannya di depan Sidang Paripurna DPR, Presiden Megawati menyatakan, pada 2003 mendatang harga seluruh jenis BBM dalam negeri akan menjadi 100 persen harga pasar, kecuali minyak tanah bagi konsumen rumah tangga.

"Ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25/2000 tentang Propenas, yang menyatakan pada 2004 subsidi BBM akan dihapuskan," katanya.

Pencabutan subsidi untuk sejumlah jenis BBM, seiring dengan penurunan secara drastis subsidi BBM dari Rp30,4 triliun pada 2002 menjadi hanya Rp13,6 triliun atau 44,7 persen.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut akan terjadi kenaikan harga pada BBM di tahun 2000, terutama untuk BBM yang pada saat ini masih bersubsidi.

Lebih lanjut Indah Suksmaningsih menyatakan, dengan kondisi saat ini saja, masyarakat sudah sangat tersiksa. "Pasti akan lebih tersiksa, jika kebijakan itu benar-benar direalisasikan," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga belum mampu menekan angka pengangguran, karena tidak berjalannya program-program penciptaan lapangan kerja baik yang distimulir oleh proyek pemerintah maupun swasta.

"Penggunaan dana kompensasi BBM, hingga saat ini tak jelas pemanfaatannya. Masyarakat kecil yang terkena merasakan dampak langsung kenaikan BBM tidak memperoleh perhatian memadai," ujarnya.

Akibatnya kualitas hidup mereka kian hari kian menyusahkan. Sebenarnya, pemerintah boleh-boleh saja melepaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap subsidi. Namun pemerintah juga harus memberikan kompensasi, yakni menyediakan lapangan kerja, agar mereka dapat bertahan hidup tanpa subsidi. (IP)